

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Penulisan

Penelitian mengenai peran Divisi Audit Internal dalam penerapan *Good Corporate Governance* yang merupakan studi kasus pada PT. Syarikat Takaful Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Audit internal PT. STI merupakan bagian perusahaan yang terdapat dalam struktur perusahaan dalam ruang yang bernama “divisi”. Prosedur dan arahan kerja Divisi Audit Internal tertuang dalam *Internal Audit Manual*. Garis kerja audit internal berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Takaful Indonesia. Divisi Audit Internal PT. STI telah menjalankan perannya sebagai *watchdog*, konsultan dan katalis pada PT. STI. Lingkup kerja Divisi Audit Internal meliputi PT. Syarikat Takaful Indonesia, PT. Asuransi Takaful Umum (PT. ATU), Asuransi Takaful Keluarga dan seluruh cabang PT. Syarikat Takaful Indonesia yang berjumlah 40 cabang, yang tersebar di wilayah tanah air Indonesia.
2. Divisi Audit Internal telah menjalankan berbagai fungsinya pada PT. STI. Divisi Audit Internal telah berupaya untuk menjalankan perannya secara efektif, namun terdapat batasan terhadap perannya dalam pengawasan internal. Divisi Audit Internal PT. STI memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan atas efektivitas *Internal Control* (IC) pada PT. STI. Lingkup penugasan yang diberikan kepada Divisi Audit Internal hanya terbatas pada operasional dan *compliance*. Seharusnya tugas terhadap keandalan pelaporan keuangan merupakan salah satu tugas Divisi Audit Internal PT. STI dalam melakukan IC dan bukan tugas yang diberikan kepada auditor eksternal secara penuh

3. PT. STI telah berusaha menerapkan GCG yang sesuai dengan standar yang berlaku yang dikeluarkan oleh KNKG (2006). Penerapan GCG juga diimplementasikan untuk meminimalisir terjadinya *agency problem* dalam perusahaan. Karena terbatasnya standar pada lingkup syariah di Indonesia, PT. STI berusaha menyempurnakan penerapan GCG dengan menyesuaikan pada standar IFSB. Dalam penerapan GCG, PT. STI membingkainya dalam aktivitas *shariah governance*, pelaksanaan prinsip TARIF dan STAF, serta penjabaran *governance structure*.

Dalam *governance structure*, terdapat fungsi Komite Audit,, dimana Komite Audit membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional atas laporan dewan direksi serta mengidentifikasi hal-hal yang membutuhkan perhatian segera dari dewan komisaris. Tujuan pembentukan Komite Audit PT. STI adalah untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT ATU & PT ATK.

PT. STI masih menggunakan istilah GCG dan belum menggunakan istilah GSG dalam penerapannya di perusahaan. Menurut penulis, hal ini dikarenakan istilah GSG atau *shariah governance* baru mulai familiar setelah dikeluarkan standar baru oleh IFSB pada Bulan Desember tahun 2009 kemarin. Pelaksanaan GCG dilakukan dengan tetap memperhatikan hak perusahaan dalam kerahasiaan. Terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan standar GCG, diantaranya belum terungkapnya kasus hukum yang dialami oleh PT. STI, masih sedikitnya informasi mengenai *corporate structure governance* dan belum terungkapnya proses *governance* dalam *annual report*.

4. Divisi Audit Internal telah berupaya berperan aktif dalam penerapan GCG pada PT. STI. Dalam hal ini, Divisi Audit Internal juga berperan dalam meminimalisir terjadinya *agency problem* pada perusahaan. Divisi Audit Internal berperan dalam berbagai aktivitas yang tercakup dalam srtandar SPAI. Dalam penerapan *Shariah Corporate Governance* (SGC), peran Divisi Audit Internal memantau pelaksanaan rapat rutin Dewan Pengawas Syariah (DPS), melakukan audit dengan

konsep syariah (*self assessment* atau audit lapangan), melakukan *check list* peraturan syariah dan melakukan *performance appraisal syariah*. Pemahaman dan pengembangan atas wawasan yang berkembang harus cepat diserap dan disesuaikan oleh Divisi Auditor Internal dan seluruh elemen penunjang pada PT.STI. Kelemahan yang terjadi dalam penerapan GCG sebagaimana yang diungkap pada poin 3 sebelumnya, seharusnya telah diketahui oleh Divisi Audit Internal PT. STI.

5. PT. STI, belum memiliki mekanisme *whistleblower* secara khusus. Program *Whistleblower* belum berjalan sebagaimana mestinya pada PT. STI. Namun, dalam hal ini penulis melihat bahwa sesungguhnya Divisi Audit Internal telah menjalankan perannya sebagai pelaksana *whistleblower*. Divisi Audit Internal berperan sebagai wadah bagi keluhan staf yang diindikasikan dapat menimbulkan kecurangan.

5.2 Saran Penulisan

Berdasarkan hasil analisa penulis, berikut adalah beberapa saran perbaikan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT. STI dan Divisi Audit internal PT. STI :

1. Penulis menyarankan agar manajemen dapat memberikan lingkup penugasan yang lebih luas bagi Divisi Audit Internal terutama pada pengawasan bagi efektivitas IC perusahaan. Lebih spesifik penulis menyarankan agar peran terhadap pengawasan keandalan atas pelaporan keuangan diberikan kepada Divisi Audit Internal. Hal ini ditujukan agar Divisi Audit Internal dapat lebih maksimal menjalankan perannya bagi perusahaan. Selain itu, penulis menyarankan agar auditor yang terdapat pada Divisi Audit Internal senantiasa mendapat pelatihan yang berkesinambungan agar kinerja Divisi IA dalam perusahaan menjadi lebih dinamis.

2. Penulis menyarankan sebaiknya perusahaan mendukung keberadaan Divisi Audit Internal yang efektif. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, keandalan pelaporan keuangan dalam IC merupakan tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal PT. STI. Pelaksanaan IC bukan merupakan tugas auditor eksternal, karena tugas dari auditor eksternal terhadap IC hanyalah menilai efektivitas IC

PT. STI akan memperoleh manfaat lebih, apabila mendukung peran Divisi Audit Internal dengan memberikan tanggung jawab atas keandalan atas pelaporan keuangan yang merupakan bagian dari IC kepada Divisi Audit Internal. Semakin Lingkup kerja Divisi Audit Internal yang luas dan efektivitas IC perusahaan, akan mampu mempengaruhi lingkup pekerjaan auditor eksternal. Hal tersebut dapat menurunkan *audit fee* bagi auditor eksternal. Otomatis laba perusahaan akan meningkat karena biaya atas jasa auditor eksternal dapat dikurangi.

Selain itu, penulis menyampaikan manfaat lain yang dapat diterima PT. STI atas perluasan lingkup audit bagi Divisi Audit Internal. Karena keandalan atas pelaporan keuangan merupakan tanggung jawab Divisi Audit Internal, maka audit internal dapat lebih membantu manajemen dalam melakukan pengawasan dan pengamanan atas *asset* perusahaan.

Efektivitas dari Divisi Audit Internal pada akhirnya akan mampu meningkatkan nilai (*value added*) bagi PT. STI dengan meningkatnya efisiensi perusahaan dan memaksimalkan implementasi semua kegiatan.

3. Dalam penerapan GCG, penulis menyarankan agar penerapan GCG untuk tahun-tahun berikut dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan penerapan *shariah governance* sebagaimana yang terdapat pada standar no.08 dan standar no. 10 IFSB. Tentunya penerapan dilakukan dengan tidak bertentangan pada prinsip dan standar yang berlaku di Indonesia.

Penulis memperoleh informasi dari Ibu Angela Indirawati Simatupang, selaku Dosen dan Praktisi pada AAJ, bahwa penerapan GSG di Indonesia mungkin akan diperlakukan segera pada pertengahan tahun ini atas prakarsa ISEA dan KNKG. Berdasarkan hal ini, penulis menyarankan agar nantinya PT. STI dapat segera menyesuaikan terhadap pedoman baru yang mendukung perkembangan GSG yang akan berlaku di Indonesia. Sehingga PT. STI dapat menjadi salah satu pelopor dalam penerapan GSG di Indonesia.

Selanjutnya penulis menyarankan agar penyempurnaan terhadap penerapan dan pelaporan GCG terus dilakukan oleh PT. STI. Termasuk didalamnya adalah dengan dimuatnya komite remunerasi, diungkapnya kasus hukum yang dialami oleh PT. STI, menyempurnakan *corporate structure governance* dan menyempurnakan pengungkapan proses *governance* dalam *annual report*.

4. Berkaitan dengan peran Divisi Audit Internal dalam penerapan GCG pada PT. STI, penulis menyarankan agar kelemahan yang penulis temukan selama penelitian dalam penerapan GCG menjadi agenda penting bagi Divisi Audit Internal untuk turut menyempurnakan penerapan GCG pada PT. STI.

Dalam melaksanakan peran terhadap penerapan *Shariah Corporate Governance*, diharapkan agar Divisi Audit Internal mampu terus mengembangkan wawasan dan keilmuan mengenai GSG. Sehingga peran Divisi Audit Internal dapat memaksimalkan penerapan GSG pada PT. STI

5. Dalam mekanisme *whistleblower*, penulis menyarankan, agar perusahaan dapat memfasilitasi pembentukan mekanisme *whistleblower*. Hal ini akan memberikan manfaat yang besar bagi PT. STI. Karena dengan adanya mekanisme *whistleblower* perusahaan dapat menjalankan perannya untuk mendukung pelaksanaan GCG bagi perusahaan yang akan menunjang efektifitas dan efisien pelaksanaan operasional perusahaan.

Selanjutnya, penulis menyarankan agar mekanisme *whistleblower* berjalan atas pengawasan Divisi Audit Internal PT. STI. Laporan-laporan dari berbagai elemen dalam perusahaan sebaiknya didiskusikan oleh Divisi Audit Internal kepada Komite Audit. Keputusan untuk mendalami permasalahan yang mungkin terungkap melalui mekanisme *whistleblower*, akan dilaksanakan setelah komite audit mendapatkan persetujuan dari manajemen.

Penelusuran masalah sebaiknya dilakukan oleh Divisi Audit Internal PT. STI dan diawasi oleh Komite Audit. Selanjutnya, hasil penelusuran dan rekomendasi atas penyelesaian masalah akan diserahkan oleh audit internal kepada komite audit. Komite audit akan menyampaikan kepada manajemen dan selanjutnya manajemen yang memutuskan penyelesaian terhadap masalah yang terjadi.

